

R-LPPD KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,06	71,92	1,21
2.	Angka Kemiskinan	5,29	5,06	-2,97
3.	Angka Pengangguran	5,23	4,67	-11,97
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,69	3,30	-
5.	Pendapatan Perkapita	14.377.222	14.851.303	2,78
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,283	0,266	-

Sumber Data : BPS Provinsi Jambi, 2025

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL/OUTCOME	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024
1	Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berprestasi dalam (PAUD)	82,40	84,06
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berprestasi dalam pendidikan dasar	87,49	95,23
		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berprestasi dalam pendidikan menengah pertama	81,85	75,39
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berprestasi dalam pendidikan kesetaraan	21,43	43,39
2	Kesehatan	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	1,37	1,42
		1.b.2	Persentase Rumah Sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	66,66	66,66
		1.b.3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	73,67
		1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	75,99
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	79,93	87,24
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,72	29,03

		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,15	86,40
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	93,00
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,47	100
		1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,56	100
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan TBC sesuai standar	100	100
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	69,87	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	58,18	57,97
		1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kabupaten	78,02	55,97
		1.c.7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	63,75	64,75
		1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	62,5	100
		1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100
		2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100
		2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	4,46	4,46
		1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan kabupaten	0	0
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	81,12	81,28
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB di kabupaten	100	100
		1.d.1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	0	100

		1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0	5
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	100	96,22
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,69	6,65
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasrana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,39	100
		2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0
5.	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat :				
	a. Satpol-PP dan Damkar	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	69,23	100
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96	90,74
	b. BPBD Kesbangpol	1.e.7	Waktu tanggap (Respon Time) penanganan Kebakaran	96,05	9,5
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	150,75	100
		1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,67	0,13
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6.	Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	100	91,44
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100
	1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,04	0,18
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100	100
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,71	2,14
	2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,23	2,23
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	73,90	73,61
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	10,08	7,87

7.	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100
		2.a.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	36,61	0,65
		2.a.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	115,49	123,370
		2.a.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	13,86	11,04
		2.a.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	66,48	83,11
8.	Transmigrasi	3.h	Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota	3	100
9.	Pangan	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	114,22	89,180
10.	Pertanahan	2.i.4	Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap di redistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	62,8	68,4
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	65,41	100
		2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	69,23	100
11.	Lingkungan Hidup	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	68,67	70,37
		2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	41,59	77,38
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	8	8
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	98,40	99,83
		2.k.1.2	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	41,32	47,71
		2.k.1.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	96,75	97,38
		2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	66,66	25,92
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.L.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	60	50
		2.L.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	9,75	8,108
14.	Perhubungan	2.n.1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,46	0,5
		2.n.2	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,25	0,45
15.	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	71,11	71,11
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	72,72	72,72
		2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	68,92	17,01

17.	Statistik	2.s.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100	100
		2.s.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100	100
18.	Persandian	2.t	Tingkat keamanan	0	0
19.	Transparasi dan Partisipasi Publik	4.e.2	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information/	100	100
20.	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	2.p.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	31,77	18,75
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	16,06	5,28
21.	Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	72,61
		3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	83,74	47,89
		3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	50,23	48,52
22.	Perindustrian	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	2,88	5,89
		3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	100
		3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	7,04	4,40
		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten	0	0
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100
23.	Penanaman Modal	2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	-15,51	-38,05
24.	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,27	0,21
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,28	0,26
		2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	6	6

24.	1. Perpustakaan	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	54,1	61,028
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	55,63	59,98
25.	2. Kearsipan	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan 59 U 43/2009)	32,53	32,53
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	32,53	37,5
25.	Kelautan dan Perikanan	3.a	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	97,50	101,08
		3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kabupaten	-100	-
26.	Pariwisata	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	-
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	28,72	80,89
		3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	27,53	22,95
		3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,58	2,52
		3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,005	4,11
27.	Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	564,26	582,09
28.	Kehutanan	3.d		0	100
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten	0	0
30.	Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	25,68	23,17
		4.a.2	Rasio PAD	13,40	12,63
		4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3
		4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3
		4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,01	93,21
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan	4	4
		4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	14,91	11,03
		4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	2,89	12,17
		4.d.3	Manajemen Aset	4	4
		4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	14,51	1,95

31.	Transparasi dan Partisipasi Publik	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	97,72	96,45
32.	Pengadaan	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0
		4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	43,53	48,84
		4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	22,10	43,09
		4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	301,06	42,62
33.	Kepegawaian	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71,03	71,706
		4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,52	19,61
		4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	46,66	36,84

C. REALISASI BELANJA

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Tahun 2024	
		Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bidang Pendidikan	346.119.376.795,00	296.584.320.820,20
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	346.119.376.795,00	296.584.320.820,20
2	Bidang Kesehatan	325.527.122.651,00	297.612.610.515,00
	Dinas Kesehatan	172.660.901.670,00	149.030.086.303,00
	RSUDH.Hanafie	152.866.220.981,00	148.582.524.212,00
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.837.261.635,00	186.985.383.991,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192.875.261.835,00	179.023.639.111,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.961.999.800,00	7.961.744.880,00
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31.311.221.742,00	30.564.553.704,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.311.221.742,00	30.564.553.704,00
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	47.169.815.035,00	21.564.234.019,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16.968.390.867,00	15.714.715.607,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	30.201.424.168,00	5.849.518.412,00
6	Bidang Sosial	7.442.725.848,00	4.668.518.740,00
	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.442.725.848,00	4.668.518.740,00

	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	665.372.476,00	549.473.970,00
	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	665.372.476,00	549.473.970,00
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.327.607.070,00	4.879.615.734,00
	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.327.607.070,00	4.879.615.734,00
7	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	38.235.876.659,00	37.528.338.231,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	38.235.876.659,00	37.528.338.231,00

PERMASALAHAN

1. Urusan Pendidikan

- Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat.
- Belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah.
- Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia.

2. Urusan Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya mulai usia kehamilan <12 minggu, karena masih ada mitos yang masih dipercaya bila memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan pada usia kehamilan terlalu kecil <12 minggu nanti kehamilannya hilang.
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pelayanan Kesehatan ibu bersalin belum mencapai target renja dan SPM.
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir belum mencapai target renja dan SPM.
- Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan Balita tidak mencapai target renja maupun SPM karena :

- a. Masih banyak balita yang masih belum lengkap mendapatkan pelayanan kesehatan antara lain imunisasi rutin masih belum lengkap diterima oleh semua balita khususnya imunisasi booster usia 18-24 bulan.
- b. Masih belum semua balita dilakukan pemantauan perkembangan (SDIDTK) lengkap sesuai usianya.
- c. Masih belum semua balita sakit diperiksa dengan manajemen balita sakit (MTBS).
- e. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak mencapai target renja maupun target SPM karena :

- Target pelayanan pada usia kesehatan dasar tidak bias tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena adanya jumlah sekolah yang melebihi kapasitas petugas sehingga tidak semua sekolah bias dilakukan skrining, serta belum optimalnya tim UKS di puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan penjangkauan sekolah.
- f. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pelayanan kesehatan usia produktif tidak mencapai target renja maupun target SPM 100% karena :

- a. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM
- b. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Masih terbatasnya sarana-prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.
- d. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang.
- e. Dukungan dan peran lintas sektor masih kurang.
- f. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM.
- g. Memaksimalkan pemeriksaan MTBS pada semua balita sakit yang

dating ke faskes.

h. Meningkatkan skill bidan, perawat dan dokter puskesmas dalam melakukan pemeriksaan MTBS.

g. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak mencapai target renja maupun target SPM karena :

- Target Pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar tidak bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena adanya jumlah sekolah yang melebihi kapasitas petugas sehingga tidak semua sekolah bisa dilakukan skrining serta blum optimalnya tim UKS di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran sekolah.

h. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pelayanan kesehatan usia produktif tidak mencapai target renja maupun target SPM 100% karena :

1. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait programPTM ;
2. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan
3. Masih terbatasnya sarana prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.
4. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang.
5. Dukungan dan peran lintas sektor masih kurang
6. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu dan PTM.
7. Belum semua Instansi/ lembaga/ organisasi/ perkumpulan/ komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM.
8. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih.
9. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi
10. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan

11. Belum ada media konseling PTM posbindu

12. Belum ada pelatihan *surveilans factor* resiko PTM berbasis web

i. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut tidak mencapai target renja maupun target SPM.

a. Sarana prasarana terkait pelayanan kesehatan (pemeriksaan Kolesterol) yang masih kurang.

b. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat (lansia) di wilayah yang masih kurang peduli terhadap kesehatan.

j. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak mencapai target renja maupun target SPM 100% karena :

1. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM

2. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Masih terbatasnya sarana-prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.

4. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang.

5. Dukungan dan peran lintas sector masih kurang.

6. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM.

7. Belum semua instansi/ lembaga/ organisasi/ perkumpulan/ komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM.

8. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih.

9. Sarana dan prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi

10. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan.

11. Belum ada media konseling PTM posbindu.

Belum ada pelatihan *surveilans factor* resiko PTM berbasis web.

k. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan penderita DM sudah mencapai target renja dan SPM.

- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sudah mencapai target renja dan SPM.

- m. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB

Pelayanan kesehatan orang dengan TB tidak mencapai target renja maupun SPM 100% karena :

1. Kurangnya pencarian aktif oleh pustu dan poskesdes ke masyarakat.
2. Kurangnya pemeriksaan kontak pasien TBC oleh tenaga kesehatan. Solusi :
3. Supervisi fasilitatif pada layanan yang terkendala
4. Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif petugas dalam menggali factor resiko.
5. Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes.
Penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci.

- n. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV tidak mencapai target renja maupun target SPM 100% karena :

- a. Belum semua faskes melaporkan capaian kegiatan testing HIV melalui aplikasi SIHA, penyebab keterbatasan SDM dan sarpras elektronik.
- b. Kemampuan petugas dalam menggali factor resiko HIV yang terbatas
- c. Penjangkauan pada populasi kunci HIV yang terbatas karena keterbatasan koordinasi lintas sektor.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kabupaten Bungo, adalah :

- 1) Kapasitas produksi air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola PDAM masih kurang mencukupi;
- 2) Masih sulitnya mencari lahan/lokasi untuk sarana air baku;
- 3) Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sambungan rumah (SR) air minum dengan tanpa tunjangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang air minum, serta terjadi refocusing anggaran pad Dana Alokasi Umum (DAU) yang terjadi pada awal tahun sehingga pencapaian SR belum memenuhi target yang ditetapkan; dan
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Beberapa kendala yang teridentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya capaian kinerja pada sektor penerapan SPM bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- 1) Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM bidang perumahan rakyat masih belum teranggarkan, sehingga belum efektif guna memenuhi target kinerja penerapan SPM sesuai dengan tahapan penerapan SPM.
- 2) Kompetensi SDM/tenaga teknis pengelola SPM bidang Perumahan Rakyat belum memadai, dimana 8 (delapan) orang pegawai dibidang Perumahan dan pemakaman belum ada pegawai yang ditetapkan khusus menangani SPM.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Data tentang daerah rawan bencana belum dilakukan pembaharuan;
- b. Tingkat pendidikan aparaturnya dan masyarakat tentang bencana masih rendah;
- c. Kurangnya sumber daya manusia/aparat Kebencanaan;
- d. Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi;
- e. Kurang/ minimnya dukungan anggaran/ pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;

- f. Belum memadainya/ masih kurangnya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

6. Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bungo pada tahun 2024 adalah Pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal baik, adapun hambatan-hambatan bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial antara lain :

- 1) Transportasi
- 2) Letak Geografis dan cuaca
- 3) Waktu
- 4) Ketidakterbukaan pemilik data, dan
- 5) Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung

D. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun 2023 belum keluar
2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Nomor 21.B/LHP/XVIII.JMB/5/2024 berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

E. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

I. Rencana Anggaran

1. Pendapatan	Rp.	1.481.276.428.260,79
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	190.849.447.772,79
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.255.910.383.788,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	34.516.596.700,00
2. Belanja	Rp.	1.606.437.931.854,79
a. Belanja Operasi	Rp.	1.163.617.345.670,23
b. Belanja Modal	Rp.	212.755.670.479,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp.	4.267.533.132,56
d. Belanja Transfer	Rp.	225.797.382.573,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	125.161.503.594,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	0

II. Realisasi

1. Pendapatan	Rp.	1.349.564.882.059,07
b. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	189.975.642.642,07
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.128.465.564.588,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	31.123.674.829,00
2. Belanja	Rp.	1.430.650.884.311,88
a. Belanja Operasi	Rp.	1.045.096.479.422,88
b. Belanja Modal	Rp.	168.594.529.723,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp.	248.151.400,00
d. Belanja Transfer	Rp.	216.711.723.766,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	125.161.503.594,89
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	0

F. INOVASI DAERAH

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1.	BAPPEDA	1. SILPI	Sistem Informasi Pengendalian dan Pelaporan Terintegrasi
		2. SINovda	Sistem Informasi Inovasi Daerah
		3. SIMPelKOPI	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan UMKM, Koperasi, Perdagangan dan Industri
		4. SIPela	Sistem Informasi Pelaporan
		5. Sipaling Santun	Sistem Informasi Pencegahan dan Pengendalian Stunting sampai benar-benar Tuntas
		6. SIMARI	Sistem Informasi Manajemen Resiko
		7. JaFung Garapan	Jabatan Fungsional Garda Terdepan Perencanaan

2.	TP-PKK	SiASIK	Sistem Administrasi Surat dan Informasi Kegiatan
3.	BKPSDMD	SIMASTER	Sistem Informasi Manajemen ASN Terpadu